

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG
DI DESA KEMBIRITAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**

Muhammad As'adi¹, Nasrodin²

Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

e-mail: asadi.bwi@gmail.com

Abstract

This study aims to apply the principles of decentralization, bottom up, involve the community actively (participatory), local governments are not given the freedom (local discretion) to determine their own regional policies. Participation is a form of active and dynamic action from the community to play its role in development activities. The population in this study were 13 people from Kembiritan village administration, 7 people from the Village Consultative Body (BPD), 10 religious leaders, 8 youth leaders and 9 female leaders. So, the total population of the study amounted to 47 people. In this study, the authors used a non-random sampling technique, namely not all members of the population were given the opportunity to be selected as samples. For more details, the non-random sampling technique that the author uses is the type of purposive sampling. Regarding community participation in the implementation of the Musrenbang this year, it is entered into Step 2 Therapy.

Keywords: Participation, Village Musrenbang, Community

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan prinsip desentralisasi, bottom up, melibatkan masyarakat secara aktif (partisipatif), pemerintah daerah tidak diberi kebebasan (local discretion) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Partisipasi adalah suatu bentuk tindakan aktif dan dinamis dari masyarakat untuk memainkan perannya dalam kegiatan pembangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah 13 orang dari perangkat desa Kembiritan, 7 orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 10 orang tokoh agama, 8 orang tokoh pemuda dan 9 orang tokoh perempuan. Jadi, total populasi penelitian berjumlah 47 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik non random sampling yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih sebagai sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang penulis gunakan adalah jenis purposive sampling. Perihal partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tahun ini masuk ke Terapi Langkah 2.

Kata kunci: Partisipasi, Musrenbang Desa, Masyarakat

Accepted: May 03 2022	Reviewed: May 14 2022	Published: May 31 2022
--------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*). Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri dari tahun ke tahun tidak pernah menjadi kenyataan, yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat terlalu dominan terhadap daerah. Pola pendekatan yang sentralistik dan keseragaman yang selama ini dikembangkan pemerintah pusat telah mematikan inisiatif dan kreativitas daerah dalam melakukan pembangunan. (Adisasmita, 2006),

Pemerintah daerah kurang diberi keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. Kewenangan yang selama ini diberikan kepada daerah tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang profesional, dan pembiayaan yang adil. Akibatnya, yang terjadi bukannya tercipta kemandirian daerah, akan tetapi justru ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, Sebagai reaksi agar masyarakat tidak *dependent* (tergantung) pada pemerintah pusat maka masyarakat harus terlibat langsung dan keterlibatan masyarakat dalam suatu pembangunan akan menentukan hasil di masa yang akan datang atau masyarakat secara mandiri akan melakukan pembangunan dengan ada atau tidaknya program dari pemerintah.

Kemudian setelah reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi yang berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom atau diberlakukannya sistem otonomi daerah. (Adisasmita, 2006) Setelah dilaksanakannya otonomi daerah penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi, selaras dan seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam (Indonesia, 2004) menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. (Midgley, 1995) mengungkapkan dalam paradigma pembangunan sosial sekarang ini pembangunan sosial mengangkat kesejahteraan sosial yang merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat melalui proses pembangunan yang menempatkan manusia pada pusat perubahan (*people-centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk

meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan nonmaterial yang penting melalui redistribusi modal, kepemilikan dan bahwa sebenarnya masyarakat tidak menolak intervensi pemerintah tetapi mereka hanya menginginkan kesejahteraan sosial yang mudah dan dapat dipahami, adil dan bersifat pragmatis. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut (Adisasmita, 2006) Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Pentingnya pembangunan yang menyentuh desa serta aspek kehidupan masyarakatnya, menempatkan pemerintah dengan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Konsep partisipasi dalam pembangunan identik dengan kekuasaan masyarakat. Partisipasi merupakan pendistribusian kekuasaan yang akan memungkinkan masyarakat bawah yang saat ini tidak terakomodasi dalam proses ekonomi dan politik, masuk ke dalam proses ini. Ini merupakan strategi yang dengannya kelompok masyarakat bergabung dalam menentukan bagaimana informasi diedarkan, goals dan kebijakan disusun serta program dioperasikan (Ardianto & Bambang, 2021)

Menurut (Mikkelsen, 2011) partisipasi adalah 'pemekaan' (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan, menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi adalah '*take a part*' atau ikut serta, Jadi menurut definisi yang telah diuraikan tersebut penulis memaknai partisipasi ialah keterlibatan, sukarela ataupun kemauan masyarakat dalam perubahan pembangunan yang akan mensejahterakan kehidupan bermasyarakat yang memiliki makna di mata masyarakat itu sendiri.

Istilah "partisipasi" pada umumnya bermakna mengajak masyarakat untuk turut bekerja atau melaksanakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Partisipasi merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa guna memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan (Hasim, 2010).

Menurut (Alfitri, 2020) terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Dan *Ketiga*, partisipasi menjadi sangat penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi, jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini,

masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Partisipasi merupakan bentuk tindakan aktif dan dinamis dari masyarakat untuk memainkan peranannya dalam aktivitas pembangunan (Ife, 2012) Kata Musrenbang merupakan singkatan dari musyawarah perencanaan pembangunan. Kata musyawarah berasal dari bahasa arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Prinsip musyawarah, dalam buku Ensiklopedia Islam, kata musyawarah menurut istilah fiqh adalah meminta pendapat orang lain atau ummat mengenai suatu urusan.

Wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Jadi, musyawarah desa sangat penting keberadaannya di tengah-tengah kehidupan bersosial dan bermasyarakat dalam membangun negara yang berkembang, negara yang makmur dan sejahtera di dalam kehidupan masyarakat desa diperlukan 1) adanya rapat; 2) adanya mufakat untuk kebijakan bersama; 3) adanya gotong royong untuk mengerjakan pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama; 4) warga desa mempunyai hak protes bersama dan menyingkir dari daerah kekuasaan raja jika tidak setuju dengan kebijakan raja.

Perencanaan pembangunan partisipatif akan berjalan dengan baik apabila prakondisi yang diperlukan dapat terpenuhi. Setidaknya ada enam prinsip dasar dalam perencanaan partisipatif, yaitu: a). Saling percaya. Diantara semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan harus saling percaya, saling mengenal dan dapat bekerjasama. Untuk menumbuhkan rasa saling percaya dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan. b). Kesetaraan. Prinsip kesetaraan dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya, tanpa adanya perasaan tertekan (bhs. Jawa; rikuh atau ewuh-pekwuh). c). Demokratis. Prinsip demokrasi menuntut adanya proses pengambilan keputusan yang merupakan kesepakatan bersama, bukan merupakan rekayasa kelompok tertentu. d). Nyata. Perencanaan hendaknya didasarkan pada segala sesuatu masalah atau kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan sesuatu yang belum jelas.

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta (Sugiyono, 2010) Sedangkan menurut Irawan Soehartono, metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan (Sunardi et al., 2020) Agar penyusunan penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka diperlukan metode penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya (Sunardi et al., 2020) penelitian lapangan atau *field Research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus pemerintahan desa Kembiritan 13 orang, Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 7 orang, tokoh agama 10 orang, tokoh pemuda 8 orang dan tokoh perempuan 9 orang. Jadi, jumlah populasi penelitian berjumlah 47 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *non random sampling* yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Untuk lebih jelasnya teknik *non random sampling* yang penulis gunakan adalah jenis *purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistematis. Untuk menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami yaitu menggunakan *Thematic Analysis* dari Miles dan Huberman. Data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam penelitian data dengan analisis data. Prosesnya berbentuk siklus bukan linear. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis penelitian ini, kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam dengan membandingkan dengan kepustakaan yang dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Bagian pertama akan bagaimana partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Kembiritan. Bagian selanjutnya, akan mendiskusikan tentang apa saja pengaruh dari partisipasi masyarakat tersebut serta apa saja faktor pendukung maupun faktor penghambat jalannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang desa Kembiritan tahun.

Partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui rembug dan musyawarah pada dasarnya kegiatan ini untuk menggali kebutuhan masyarakat. Partisipasi atau ikut serta merupakan kunci awal musyawarah yang merupakan budaya patut untuk dilestarikan. Dengan adanya musyawarah atau rembug diharapkan akan tercapai

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum. forum-forum tersebut dikonsep agar masyarakat berpartisipasi sejak penentuan keputusan prioritas pembangunan serta musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun atau lima tahun secara partisipatif dapat berkesinambungan berjalan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang desa Kembiritan tahun relatif rendah. Terkait siapa-siapa yang diundang dalam Musrenbang aparat desa Kembiritan menentukan 50 undangan yang disebar untuk peserta yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat secara umum. Pada Musrenbang desa Kembiritan tahun, jumlah peserta yang hadir berjumlah 23 orang.

Namun kenyataannya, dari 50 peserta yang diundang yang tidak hadir berjumlah 27 orang. Dan 23 orang peserta Musrenbang desa Kembiritan yang aktif memberikan/masukan hanya 7 (tujuh) orang. Yaitu mereka yang aktif ialah Bapak Dameyanto menyetujui usulan program pihak pemerintah desa, Bapak Gutomo mengkritisi pembangunan dan peserta yang tidak hadir yang ada di desa tersebut, Ibu Giarti memberikan usulan/masukan terkait program pembangunan desa dan Bapak Sulaiman juga memberikan usulan program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang ada di desa Kembiritan masih rendah dalam memberikan sumbangan pemikiran saat proses pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil Musrenbang di desa Kembiritan yaitu: Pertama, minimnya pendampingan, kurangnya pendamping dan fasilitator desa yang kompeten dan mampu melaksanakan perencanaan partisipatif, menyebabkan prioritas kegiatan terkadang tidak dapat terakomodir. Untuk mengatasi hal tersebut diupayakan adanya peningkatan kapasitas tim pendamping dan fasilitator desa. Serta mampu melaksanakan analisis situasi dan masalah secara partisipatif. Kedua, masyarakat kurang percaya diri sehingga, mereka hanya bergantung kepada orang lain.

Dari analisa penulis, salah satu cara untuk membangun partisipasi masyarakat dalam Musrenbang adalah dengan adanya kegiatan sosialisasi antar masyarakat dengan pemerintah setempat dan kalangan masyarakat terbawah sekali pun untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat desa Kembiritan. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat diharapkan dapat lebih melibatkan sebanyak mungkin yang turut beraspirasi atau berargumen pada saat acara Musrenbang yang dilaksanakan secara bersama guna mencapai tujuan bersama.

Faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program, ialah timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya 3 (tiga) faktor utama yang mendukung, yaitu: 1). Kemauan untuk berpartisipasi; 2). Kemampuan untuk berpartisipasi; dan 3). Kesempatan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi, Kemauan untuk Berpartisipasi, Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental masyarakat, sikap tersebut meliputi:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan;
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya;
- c. Sikap untuk selalu memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri;
- d. Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan; dan
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Dengan mempertimbangkan aspek ini, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi akan bermakna penting, kehidupan warga komunitas akan semakin kokoh, dan tidak rentan terhadap kebijakan eksternal yang cenderung merugikan warga komunitas. Upaya seperti ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang bias terhadap masyarakat lokal dan warga komunitas.

D. Simpulan

Secara umum partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Kembiritan tahun 2017 adalah rendah dengan karakteristik: *Pertama*, Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan dilihat dari tingkat kehadiran rendah. *Kedua*, Respon masyarakat pada kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam Musrenbangnya untuk mengungkapkan pendapat usul/saran juga rendah. *Ketiga*, Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Kembiritan masuk pada Step ke-3 dan Step ke-4 yaitu ketika memperoleh partisipasi, masyarakat mungkin saja akan mendengarkan dan didengarkan, tetapi dibawah kondisi ini mereka kehilangan kekuasaan untuk menjamin bahwa pendapat mereka akan ditanggapi oleh pemegang kekuasaan.

Kemudian, Hasil penelitian tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan di desa belum maksimal. Dalam penelitian ini tidak semua faktor penghambat dibahas oleh peneliti. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut merupakan suatu tugas yang perlu diselesaikan oleh pemerintah dan berusaha mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dibutuhkan pula adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk memotivasi, mengajak dan berusaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tahun masuk pada ke Step 2 *Therapy*. Step ini menggambarkan level *nonpartisipasi* yang direkayasa oleh beberapa pihak untuk menggantikan partisipasi murni. Dimana dalam pelaksanaan program pembangunan desa masyarakat bersikap pasif yang hanya menunggu intruksi dari aparat desa sehingga bersifat *top-down*.

Daftar Rujukan

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu.
- Alfitri, A. (2020). Protecting Women from Domestic Violence: Islam, Family Law, and the State in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(2), 273–307.
- Ardianto, E., & Bambang, Q. (2021). *Filsafat Ilmu Komunikasi*.
- Hasim, M. (2010). Pembelajaran Berbasis Masyarakat di SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 17(2), 263–274.
- Ife, J. (2012). *Human rights and social work: Towards rights-based practice*. Cambridge University Press.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. Sage.
- Mikkelsen, B. (2011). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Panduan bagi praktisi lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sunardi, N., Lesmana, R., Kartono, K., & Rudy, R. (2020). Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan bagi Umkm Pasar Modern Intermoda Bsd City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 2(1).